

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 64, Retribusi daerah Adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 angka (1) dan (2) menyebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua jenis diantaranya adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan ; dan
5. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Wallet;
10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pendapatan daerah terbesar, dan terlihat jelas dari beberapa pernyataan yang muncul dari penelitian maupun secara faktanya dalam pers terbuka yang dikemas oleh Humas Bappeda Jabar yaitu pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2017.

Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor saat ini membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terdapat jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pada awalnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan opsen atas penjualan bensin yang dianggap sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun akan meningkat, (Samudra, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Berikut *Research GAP* berbagai penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Tabel 1.1 Research GAP berbagai penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Tabel merupakan hasil dari *research* GAP jurnal penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah/PAD)

NO	VARIABEL INDEPENDEN	VARIABEL DEPENDEN	HASIL PENELITIAN	PENELITIAN
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Signifikan	Rizal, Hidayah (2018)
			Positif Signifikan	Auliah, Sapiri, & Idris (2018)
			Positif Signifikan	Nahumury (2018)
			Positif Signifikan	Suryadi, Martiwi, & Karlina (2019)
			Positif Signifikan	Atteng, Kalangi, & Samual (2019)
			Positif Signifikan	Aliah, Hamzah, & Nasir (2019)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Signifikan	Rizal, Hidayah (2018)
			Tidak Signifikan	Auliah, Sapiri, & Idris (2018)
			Tidak Signifikan	Atteng, Kalangi, & Samual (2019)

NO	VARIABEL INDEPENDEN	VARIABEL DEPENDEN	HASIL PENELITIAN	PENELITIAN
			Tidak Signifikan	Aliah, Hamzah, & Nasir (2019)
			Positif Signifikan	Saputra, & Putri (2020)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Positif Signifikan	Ferdiansyah (2020)
			Positif Signifikan	Saputra, & Putri (2020)

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 SID 2021

NO	JENIS PAJAK	2015			2016			2017			TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	%									
1	PKB	5.224.253.000.000	5.355.778.195.650	102,52	5.928.266.000.000	6.185.202.921.550	104,33	6.140.280.000.000	6.534.054.655.292	106,41	7.180.342.000.000	7.540.770.278.845	105,02
2	BBNKB	4.441.202.000.000	4.662.471.061.900	104,98	4.606.799.000.000	4.984.049.418.600	108,19	4.814.126.000.000	5.092.551.608.700	105,78	5.352.889.000.000	5.527.989.187.700	103,27
3	PBBKB	2.258.981.957.000	2.377.653.929.059	105,25	2.203.754.854.637	2.007.858.327.949	91,11	2.191.395.488.000	2.314.028.808.428	105,60	2.356.184.651.000	2.512.911.700.663	106,65
4	PAP	50.479.000.000	52.486.074.700	103,98	56.182.000.000	64.842.725.501	115,42	60.000.000.000	59.247.318.669	98,75	42.624.011.000	52.861.602.273	124,02
5	PAJAK ROKOK	2.301.564.370.000	2.168.682.105.545	94,23	2.218.479.251.184	2.307.826.764.632	104,03	2.420.830.796.000	2.483.213.129.555	102,58	2.448.770.235.000	2.519.085.324.712	102,83
	JUMLAH	14.278.480.327.000	14.817.071.368.854	102,39	15.013.481.105.821	15.549.780.159.232	103,57	15.626.632.284.000	16.483.095.520.644	105,48	17.381.809.897.000	18.153.618.094.193	104,44

NO	JENIS PAJAK	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	PKB	8.034.519.000.000	8.174.357.408.900	101,74	10.146.043.771.250	7.610.388.542.717	75,01	7.860.554.777.000	8.180.012.934.460	104,06
2	BBNKB	6.026.074.000.000	6.300.781.441.900	104,56	4.535.600.000.000	3.902.583.887.500	86,04	4.780.602.672.000	5.161.845.470.700	107,97
3	PBBKB	2.563.169.934.000	2.616.034.041.920	102,06	2.593.277.978.000	2.274.681.301.388	87,71	2.274.681.300.000	2.410.563.955.679	105,97
4	PAP	60.000.000.000	55.711.190.736	92,85	50.000.000.000	58.799.874.798	117,60	144.799.875.000	61.799.089.371	42,68
5	PAJAK ROKOK	2.539.238.008.000	2.479.468.228.309	97,65	3.079.397.271.000	3.189.509.530.010	103,58	2.922.651.658.110	3.033.009.967.351	103,78
	JUMLAH	19.223.000.942.000	19.626.352.311.765	102,10	20.484.319.029.250	17.035.963.236.413	83,49	17.983.290.282.110	18.847.231.417.561	104,80

Gambar 1.1 Target & Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat

Sumber: BAPENDA Provinsi Jawa Barat

Laporan target dan realisasi pajak daerah yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat tentang laporan tahun berjalan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, laporan tersebut termuat rekapitulasi laporan target dan realisasi pajak daerah provinsi jawa barat yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (PAROK). Data tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2020 mengalami presentase penurunan realisasi lebih rendah dibandingkan target. Berdasarkan hasil data tersebut ditemukan fenomena naik dan turunnya target dan realisasi pajak daerah Provinsi Jawa Barat sehingga Penulis tertarik untuk mencoba membuktikan dalam sebuah penelitian.

Penulis mencoba membandingkan hasil peneliti lain dengan pembuktian berpengaruh PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap PAD Jawa Barat, dengan bahwa ketiga variabel unsur pada judul tersebut berpengaruh pada PAD Jawa Barat. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena

Penelitian Ini penting untuk dilakukan karena sebagian besar hasil penelitian terdahulu bahwa PKB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan sebagian penelitian menyatakan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD, dan yang terakhir adalah PBBKB merupakan penelitian baru yang sebagian dari peneliti terdahulu mengatakan hasil berpengaruh dan sebagian mengatakan hasil kurang berpengaruh dengan alasan berbagai aspek yang mempengaruhi. Namun diluar semua itu PKB, BBNKB, dan PBBKB termasuk Pajak Daerah yang sesuai pada peraturan Undang-undang yang berlaku.

Penulis melakukan penelitian ini dengan melihat banyaknya penelitian terdahulu yang hanya meneliti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor saja dengan beranggapan dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang lengkap. Pada penelitian ini penulis coba menambahkan satu hal pembeda yang dirasa lebih lengkap yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Selain dari pada hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode kombinasi atau *mix method* dengan pengambilan data sekunder peneliti juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak informan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah pada latar belakang dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Fenomena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 secara jelas dipaparkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, namun apakah hal tersebut akan tetap konsisten pada tahun berikutnya.

2. Penelitian ini mengarah pada pembuktian untuk beberapa jenis Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
3. Beberapa penelitian mengatakan hasil yang positif dan signifikan pada PKB, BBNKB, dan PBBKB berkontribusi penuh pada PAD Provinsi selain Jawa Barat, terdapat juga sebagian dari penelitian menyatakan hasil tidak signifikan bahkan sangat kecil kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap PAD Provinsi selain Jawa Barat.
4. Adanya fenomena dan fakta yang terjadi pada beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten pada Provinsi selain Jawa Barat, peneliti bermaksud menguji Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
5. Data berupa angka saja belum cukup valid sehingga peneliti melakukan wawancara dengan pihak informan yang berada pada di tempat penelitian, untuk membuktikan komponen Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) apakah berkontribusi secara signifikan atau bahkan tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

1.3 Batasan Penelitian

Penulis menggunakan tiga variable yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menggunakan data yang digunakan kurun waktu pada tahun 2017-2020.

1. Penelitian ini memiliki satu variabel Dependen dan tiga variabel Independen.
2. Variabel Dependen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan variabel Independen meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
3. Metode yang digunakan adalah kombinasi atau *mix method*.
4. Penelitian ini menggunakan data primer dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan di tempat penelitian dan sekunder yang diambil secara autentik dalam kurun waktu tertentu, yaitu empat tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

5. Selain data sekunder penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara langsung terhadap informan pihak ketiga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat yang diambil secara *realtime*.
6. Penelitian ini menggunakan alat bantu analisis SPSS Versi 26.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?
3. Apakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?
4. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?
5. Apakah hasil dari wawancara terhadap informan mengarah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada hasil positif berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
4. Pengaruh secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
5. Melakukan wawancara secara langsung terhadap informan untuk mendapatkan informasi data yang valid.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca maupun penulis untuk :

1. Menjadi pertimbangan untuk membantu pengabilan kebijakan, dapat meningkatkan efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Bermanfaat sebagai informasi tambahan.
3. Memberikan pemahaman lebih tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

